



BAB II

KAJIAN PUSTAKA

Bab ini terbagi dalam beberapa sub bab, pertama ada landasan teoritis yang berisikan hal-hal umum mengenai mekanisme *Good Corporate Governance* seperti: definisi kinerja keuangan, definisi good corporate governance, prinsip GCG, manfaat GCG, tujuan GCG. Lalu ada juga teori-teori mengenai variabel dari penelitian yang akan dibahas dan dijadikan patokan dasar pada pengambilan kesimpulan nantinya.

Setelah landasan teoritis, ada juga yang kedua yaitu penelitian terdahulu, penelitian terdahulu digunakan sebagai dasar dalam menentukan hipotesis penelitian. Kemudian yang ketiga ada kerangka pemikiran yang berisi skema arahan hipotesis dan yang terakhir yaitu hipotesis, Hipotesis beisikan penjelasan dari skema kerangka pemikiran.

A. Landasan Teoritis

1. Kinerja Keuangan

Berhasil tidaknya suatu perusahaan ditandai oleh kemampuan manajemen dalam membaca atau melihat segala kemungkinan atau kesempatan dimasa yang akan datang, baik jangka pendek maupun jangka panjang. Oleh karena itu tugas dari para manajer untuk merencanakan masa depan, segala kemungkinan dan kesempatan dimasa yang akan datang dan bagaimana menghadapi dimasa sekarang. Suatu perusahaan tidak hanya berfungsi untuk menghasilkan produk yang bermutu dengan menetapkan harga untuk menarik konsumen, tapi pihak perusahaan harus mempertimbangkan kondisi internal perusahaan.

Dalam era globalisasi seperti sekarang ini persaingan dalam dunia usaha sangat ketat. Para pelaku usaha harus berusaha memperbaiki manajemen perusahaan agar dapat ikut

© Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mengemukakan dan menyebutkan sumber dari mana dikutipnya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penyusunan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.

bersaing dengan perusahaan yang bergerak dibidang yang sama. Sedangkan dalam menghadapi persaingan perusahaan harus memiliki dana yang cukup dalam melakukan hal baru agar para konsumen atau pembeli dapat berminat untuk membeli produk yang dihasilkan oleh perusahaan.

Analisis rasio keuangan ini adalah salah satu cara memproses dan penginterpretasian informasi akuntansi yang digunakan untuk menjelaskan hubungan tertentu antara angka yang satu dengan angka yang lain dari suatu laporan keuangan. Salah satu fungsi laporan keuangan adalah untuk melakukan pengukuran termasuk pengukuran prestasi, hasil usaha, laba, maupun posisi keuangan. Salah satu yang sangat penting adalah untuk pengukuran laba. Laba merupakan salah satu pengukuran aktivitas operasi dan dihitung berdasarkan dasar akuntansi akurat. Dua proses utama dalam pengukuran laba adalah pengakuan pendapatan dan pengaitan beban. Pengakuan pendapatan merupakan titik awal pengukuran laba. Oleh karena itu, pendapatan tersebut harus memenuhi dua syarat, yaitu pendapatan telah atau dapat direalisasikan dan pendapatan telah dihasilkan. Pengukuran laba ini bukan hanya penting untuk mengetahui prestasi perusahaan, tetapi juga penting untuk sebagai informasi bagi pembagi laba, penentuan kebijakan investasi, pembayaran pajak, zakat, bonus, dan pembagian hasil.

Baik buruknya pengelolaan perusahaan dapat tercermin dari kinerja keuangan suatu perusahaan. Menurut Fahmi (2011:2) kinerja keuangan adalah suatu analisis yang dilakukan untuk melihat sejauh mana suatu perusahaan telah melaksanakan dengan menggunakan aturan-aturan pelaksanaan keuangan secara baik dan benar. Supaya dapat mengetahui perkembangan suatu perusahaan, seorang manajer keuangan haruslah mampu menganalisis kondisi keuangan suatu perusahaan. Analisis dilakukan terhadap laporan keuangan yang dikeluarkan oleh perusahaan yaitu neraca, laporan laba rugi serta laporan keuangan lainnya.





Salah satu cara untuk menilai efisiensi kinerja keuangan dari suatu usaha dalam manajemen keuangan adalah dengan menggunakan analisis rasio profitabilitas. Analisis profitabilitas diperlukan untuk menilai besar kecilnya produktifitas usaha sebuah perusahaan. Menurut Munawir (2004:33) rasio profitabilitas menunjukkan kemampuan perusahaan dalam menghasilkan laba selama periode tertentu. Rasio ini memberikan gambaran tingkat efektivitas pengelolaan perusahaan. Profitabilitas sering digunakan dalam suatu perusahaan dengan membandingkan antara laba dan modal yang digunakan dalam operasi. Pemodal dapat menggunakan profitabilitas suatu perusahaan sebagai alat untuk mengukur modal yang ditanamkan perusahaan tersebut.

Salah satu rasio yang umumnya digunakan sebagai pengukur kinerja keuangan perusahaan adalah *Return On Assets* (ROA). Menurut Mardiyanto (2009:196) *Return On Assets* (ROA) merupakan rasio yang digunakan untuk mengukur kemampuan perusahaan dalam menghasilkan laba karena rasio tersebut mewakili pengembalian atas aktivitas perusahaan. Menurut Hery (2014:193) semakin tinggi hasil pengembalian atas aset berarti semakin tinggi pula jumlah laba bersih yang dihasilkan setiap rupiah dana yang tertanam dalam total aset. Sebaliknya, semakin rendah hasil pengembalian atas aset berarti semakin rendah pula jumlah laba bersih yang dihasilkan dari setiap rupiah dana yang tertanam dalam total aset tersebut.

Alasan dipilihnya *Return On Assets* (ROA) sebagai ukuran kinerja keuangan karena rasio tersebut mewakili pengembalian atas aktivitas perusahaan. Menurut Mawardi (2005) *Return On Assets* (ROA) memfokuskan kemampuan perusahaan untuk memperoleh *earning* dalam keseluruhan operasi perusahaan. Selain itu juga dapat dipakai sebagai alat untuk melihat apakah perusahaan tersebut masih dapat bertahan atau tidak di masa yang akan datang. Analisis ROA dalam analisis keuangan mempunyai arti yang sangat penting karena merupakan salah satu teknik yang bersifat menyeluruh (*comprehensive*). Analisis ROA

merupakan teknik analisis yang lazim digunakan untuk mengukur tingkat efektifitas dari keseluruhan operasi perusahaan.

Kasmir (2012:202) *Return On Assets* (ROA) adalah rasio yang menunjukkan hasil (*return*) atas jumlah aktiva yang digunakan dalam perusahaan. Selain itu ROA memberikan suatu ukuran tentang efektifitas manajemen dalam mengelola investasinya. Dan Hery (2014) *Return On Assets* (ROA) merupakan rasio yang menunjukkan seberapa besar kontribusi aset dalam menciptakan laba bersih. Dengan kata lain, rasio ini digunakan untuk mengukur seberapa besar jumlah laba bersih yang akan dihasilkan dari setiap rupiah dana yang tertanam dalam total aset. Semakin besar ROA maka semakin besar pula tingkat keuntungan yang dicapai oleh perusahaan tersebut dan semakin baik pula posisi perusahaan tersebut dari segi penggunaan *assets*.

Menurut Munawir (2007), *Return on Assets* merupakan rasio keuangan perusahaan yang berhubungan dengan profitabilitas mengukur kemampuan perusahaan menghasilkan keuntungan atau laba pada tingkat pendapatan, aset, dan modal saham tertentu. Abdullah (2005) menyatakan bahwa *Return On Assets* adalah rasio yang mengukur efektifitas perusahaan di dalam menghasilkan keuntungan dengan memanfaatkan aktiva yang dimiliki perusahaan.

Berdasarkan uraian di atas, maka dapat disimpulkan bahwa *Return On Assets* (ROA) adalah rasio yang digunakan perusahaan untuk mengukur kemampuan perusahaan dalam memperoleh laba bersih dari pengelolaan aset yang telah dimiliki.

Semakin tinggi rasio ini maka semakin baik produktivitas aset dalam memperoleh keuntungan bersih. Dengan mengetahui ROA kita dapat menilai apakah perusahaan telah efisien dalam menggunakan aktiva dalam kegiatan operasi untuk menghasilkan keuntungan. Laba bersih (*net income*) merupakan ukuran pokok keseluruhan keberhasilan



perusahaan. ROA dapat membantu perusahaan yang telah menjalankan praktik akuntansi dengan baik untuk mengukur efisiensi penggunaan modal yang menyeluruh terhadap setiap hal yang mempengaruhi keadaan keuangan perusahaan sehingga dapat diketahui posisi perusahaan terhadap industri.

Rasio profitabilitas ini digunakan untuk menganalisis serta untuk mengetahui informasi kesehatan suatu perusahaan. Munawir (2004) kelebihan analisis rasio ROA yaitu sifatnya yang menyeluruh, dapat digunakan untuk mengukur efisiensi tindakan yang dilakukan oleh divisi/bagian, juga dapat digunakan untuk mengukur profitabilitas dari masing-masing produk yang dihasilkan perusahaan dan berguna untuk keperluan kontrol, juga berguna untuk keperluan perencanaan.

Munawir (2010) kinerja keuangan perusahaan merupakan satu diantara dasar penilaian mengenai kondisi keuangan perusahaan yang dilakukan berdasarkan analisa terhadap rasio keuangan perusahaan. Pihak yang berkepentingan sangat memerlukan hasil dari pengukuran kinerja keuangan perusahaan untuk dapat melihat kondisi perusahaan dan tingkat keberhasilan perusahaan dalam menjalankan kegiatan operasionalnya. Sawir (2003) dalam menilai kinerja keuangan yang menggunakan analisis rasio keuangan perlu diketahui standar rasio keuangan tersebut. Yuwono, Sukarno, dan Ichsan (2003) dengan adanya standar rasio keuangan, perusahaan dapat menentukan apakah kinerja keuangannya baik atau tidak. Penilaian ini dilakukan dengan membandingkan rasio keuangan yang diperoleh dengan standar rasio keuangan yang ada. Pada umumnya, kinerja keuangan perusahaan dikategorikan baik jika besarnya rasio keuangan perusahaan bernilai sama dengan atau di atas standar rasio keuangan.

Munawir (2010) selain membandingkan rasio keuangan dengan standar rasio, kinerja keuangan juga dapat dinilai dengan membandingkan rasio keuangan tahun yang dinilai





dengan rasio keuangan pada tahun-tahun sebelumnya. Dengan membandingkan rasio keuangan pada beberapa tahun penilaian dapat dilihat bagaimana kemajuan ataupun kemunduran kinerja keuangan sesuai dengan kegunaan masing-masing rasio tersebut.

ROA yang telah diketahui, digunakan perusahaan untuk menilai efisiensi aktivitya dalam kegiatan operasi untuk menghasilkan keuantungan. ROA dapat dirumuskan sebagai berikut:

$$ROA = \frac{\text{Laba Bersih Setelah Pajak}}{\text{Total Asset}} \times 100\%$$

2. Good Corporate Governance

a. Pengertian *Good Corporate Governance*

Istilah *Corporate Governance* seringkali diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia sebagai tata kelola perusahaan. Dalam modul ini, istilah *Corporate Governance* dan tata kelola perusahaan tersebut dipergunakan secara bergantian. Pengertian *Corporate Governance* sendiri telah dikemukakan oleh banyak institusi dan para pakar. Berikut ini disajikan beberapa definisi *Corporate Governance* yang banyak digunakan sebagai acuan dalam diskusi dan tulisan-tulisan.

Secara umum istilah *Good Corporate Governance* merupakan sistem pengendalian dan pengaturan perusahaan yang dapat dilihat dari mekanisme hubungan antara berbagai pihak yang mengurus perusahaan (hard definition), maupun ditinjau dari "nilai-nilai" yang terkandung dari mekanisme pengelolaan itu sendiri (soft definition).

Corporate Governance adalah rangkaian proses terstruktur yang digunakan untuk mengelola serta mengarahkan atau memimpin bisnis dan usaha-usaha korporasi dengan tujuan untuk meningkatkan nilai-nilai perusahaan serta kontinuitas usaha. Terdapat beberapa



pemahaman tentang pengertian *Corporate Governance* yang dikeluarkan beberapa pihak baik dalam perspektif yang sempit (shareholder) dan perspektif yang luas (stakeholders, namun

pada umumnya menuju suatu maksud dan

pengertian yang sama.

The Organization for Economic Cooperation and Development (OECD) merupakan salah satu organisasi internasional yang sangat aktif mendukung implementasi dan perbaikan *Corporate Governance* di seluruh dunia. OECD mendefinisikan *Corporate Governance* sebagai berikut (Sutojo dan Aldridge, 2005):

"*Corporate Governance* is the system by which business corporations are directed and controlled. The *Corporate Governance* structure specifies the distribution of rights and responsibilities among different participants in the corporation, such as the board, the managers, shareholders and other stakeholders, and spells out the rules and procedures for making decisions on corporate affairs. By doing this, it also provides the structure through which the company objective are set, and the means of attaining those objectives and monitoring performance."

"Tata Kelola Perusahaan adalah sistem di mana perusahaan bisnis diarahkan dan dikendalikan. Struktur Tata Kelola Perusahaan menetapkan distribusi hak dan tanggung jawab di antara peserta yang berbeda dalam perusahaan, seperti dewan, manajer, pemegang saham dan pemangku kepentingan lainnya, dan merinci aturan dan prosedur untuk membuat keputusan tentang urusan perusahaan. Oleh melakukan ini, ia juga menyediakan struktur di mana tujuan perusahaan ditetapkan, dan cara untuk mencapai tujuan tersebut dan memantau kinerja."

Pakar *Corporate Governance* dari Inggris, Jill Solomon dan Aris Solomon dalam bukunya "*Corporate Governance and Accountability*" (2004) mendefinisikan: "*Corporate Governance* is the system of checks and balances, both internal and external to companies,

which ensures that companies discharge their accountability to all their stakeholders and act in a socially responsible way in all areas of their business activity."

"Tata Kelola Perusahaan adalah sistem checks and balances, baik internal maupun eksternal perusahaan, yang memastikan bahwa perusahaan melaksanakan akuntabilitas mereka untuk semua pemangku kepentingan mereka dan bertindak dengan cara yang bertanggung jawab secara sosial di semua bidang bisnis mereka aktivitas."

Menurut Sutedi (2011) Corporate Governance adalah suatu proses dan struktur yang digunakan oleh organ perusahaan (Pemegang Saham/Pemilik Modal, Komisaris/dewan Pengawas dan Direksi) untuk meningkatkan keberhasilan usaha dan akuntabilitas perusahaan guna mewujudkan nilai pemegang saham dalam jangka panjang dengan tetap memperhatikan kepentingan stakeholder lainnya, berlandaskan peraturan perundang-undangan dan nilai-nilai etika.

Selanjutnya, menurut Komite Cadbury (1992), *good corporate governance* adalah prinsip yang mengarahkan dan mengendalikan perusahaan agar mencapai keseimbangan antara kekuatan serta kewenangan perusahaan dalam memberikan pertanggungjawabannya kepada para *shareholders* pada khususnya, dan *stakeholders* pada umumnya. Sedangkan OECD (*organisation for economic cooperation and development*) (2004) dan FCGI (*Forum for corporate governance* di Indonesia) (2001) mendefinisikan *good corporate governance* sebagai seperangkat peraturan yang menetapkan hubungan antara pemegang saham, pengurus, pihak kreditur, pemerintah, karyawan serta pemangku kepentingan lainnya sehubungan dengan hak-hak dan kewajiban mereka. Atau dengan kata lain sistem yang mengarahkan dan mengendalikan perusahaan.

Definisi *Corporate Governance* sesuai dengan Surat Keputusan Menteri BUMN No Kep-117/M-MBU/2002 tanggal 31 Juli 2002 tentang penerapan praktik *good corporate*



governance pada BUMN adalah: “Suatu proses dan struktur yang digunakan oleh organ BUMN untuk meningkatkan keberhasilan usaha dan akuntabilitas perusahaan guna

mewujudkan nilai pemegang saham dalam jangka panjang dengan tetap memperhatikan kepentingan *stakeholder* lainnya, berlandaskan peraturan perundangan dan nilai-nilai etika”.

Definisi ini menekankan pada keberhasilan usaha dengan memperhatikan akuntabilitas yang berlandaskan pada peraturan perundangan dan nilai-nilai etika serta memperhatikan *stakeholders* yang tujuan jangka panjangnya adalah untuk mewujudkan dan meningkatkan nilai pemegang saham.

Berdasarkan definisi-definisi di atas, GCG secara singkat dapat diartikan sebagai seperangkat sistem yang mengatur dan mengendalikan perusahaan untuk menciptakan nilai tambah (value added) bagi para pemangku kepentingan. Hal ini disebabkan karena GCG dapat mendorong terbentuknya pola kerja manajemen yang bersih, transparan dan profesional. Penerapan GCG di perusahaan akan menarik minat para investor, baik domestik maupun asing. Hal ini sangat penting bagi perusahaan yang ingin mengembangkan usahanya, seperti melakukan investasi baru.

Berdasarkan uraian mengenai Corporate Governance tersebut, maka dapat disimpulkan bahwa Good Corporate Governance adalah suatu sistem pengelolaan perusahaan yang dirancang untuk meningkatkan kinerja perusahaan, melindungi kepentingan *stakeholders* dan meningkatkan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan serta nilai-nilai etika yang berlaku secara umum.

b. Prinsip-prinsip *Good Corporate Governance*

Pada dasarnya, esensi dari *corporate governance* adalah peningkatan kinerja perusahaan melalui supervisi atau pemantauan kinerja manajemen dan adanya akuntabilitas manajemen terhadap pemangku kepentingan lainnya, berdasarkan kerangka aturan dan peraturan yang berlaku (Kaihatu, 2006). Oleh karena itu, tujuan *good corporate*





governance adalah untuk menciptakan nilai tambah bagi semua pihak yang berkepentingan (Arifin, 2005). Pihak-pihak tersebut adalah pihak internal yang meliputi dewan komisaris, direksi, karyawan, dan pihak eksternal yang meliputi investor, kreditor, pemerintah, masyarakat dan pihak-pihak lain yang berkepentingan (*stakeholders*).

Dalam mewujudkan *good corporate governance*, diperlukan adanya dua aspek keseimbangan, yaitu keseimbangan internal dan eksternal. Keseimbangan internal dilakukan dengan cara menyajikan informasi yang berguna dalam evaluasi kinerja, informasi tentang sumber daya yang dimiliki perusahaan, semua transaksi dan kejadian internal, dan informasi untuk keputusan manajemen internal. Sedangkan keseimbangan eksternal dilakukan dengan cara menyajikan informasi bisnis kepada para pemegang saham, kreditor, bank, dan organisasi lainnya yang berkepentingan. Untuk mewujudkan dua aspek keseimbangan tersebut, terdapat beberapa prinsip dasar praktik *good corporate governance*. Berdasarkan Pedoman Umum *Good Corporate Governance* Indonesia, yang dikeluarkan oleh Komite Nasional Kebijakan *Governance* (KNKG, 2006).

Terdapat 5 asas *good corporate governance*. Kelima asas tersebut adalah transparansi, akuntabilitas, responsibilitas, independensi serta kewajaran dan kesetaraan:

(1) Transparansi (*Transparency*)

Prinsip dasar dalam asas transparansi adalah bahwa perusahaan harus menyediakan informasi yang material dan relevan dengan cara yang mudah diakses dan dipahami oleh pemangku kepentingan dalam menjalankan bisnisnya. Lebih lanjut lagi, perusahaan harus mengambil inisiatif untuk mengungkapkan tidak hanya masalah yang disyaratkan oleh peraturan perundang-undangan, tetapi juga hal yang penting untuk pengambilan keputusan oleh pemegang saham, kreditor dan pemangku kepentingan lainnya. Dalam pedoman pelaksanaannya, asas transparansi berarti bahwa Perusahaan harus menyediakan informasi secara tepat waktu, memadai, jelas, akurat dan dapat diperbandingkan serta mudah diakses

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.

2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.

oleh pemangku kepentingan sesuai dengan haknya. Kemudian ditegaskan bahwa Informasi yang harus diungkapkan meliputi, tetapi tidak terbatas pada, visi, misi, sasaran usaha dan strategi perusahaan, kondisi keuangan, susunan dan kompensasi pengurus, pemegang saham pengendali, kepemilikan saham oleh anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris beserta anggota keluarganya dalam perusahaan dan perusahaan lainnya, sistem manajemen risiko, sistem pengawasan dan pengendalian internal, sistem dan pelaksanaan GCG serta tingkat kepatuhannya, dan kejadian penting yang dapat mempengaruhi kondisi perusahaan.

(2) Akuntabilitas (*Accountability*)

Dalam asas akuntabilitas, prinsip dasar penerapan *good corporate governance* mengandung makna bahwa Perusahaan harus dapat mempertanggungjawabkan kinerjanya secara transparan dan wajar. Untuk itu perusahaan harus dikelola secara benar, terukur dan sesuai dengan kepentingan perusahaan dengan tetap memperhitungkan kepentingan pemegang saham dan pemangku kepentingan lain. Berdasarkan prinsip dasar ini, perusahaan harus menetapkan rincian tugas dan tanggung jawab masing-masing organ perusahaan dan semua karyawan secara jelas dan selaras dengan visi, misi, nilai-nilai perusahaan (*corporate values*), dan strategi perusahaan. Perusahaan juga harus meyakini bahwa semua organ perusahaan dan semua karyawan mempunyai kemampuan sesuai dengan tugas, tanggung jawab, dan perannya dalam pelaksanaan GCG. Kemudian, perusahaan harus memastikan adanya sistem pengendalian internal yang efektif dalam pengelolaan perusahaan. Juga, perusahaan harus memiliki ukuran kinerja untuk semua jajaran perusahaan yang konsisten dengan sasaran usaha perusahaan, serta memiliki sistem penghargaan dan sanksi (*reward and punishment system*). Selanjutnya, dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya, setiap organ perusahaan dan semua karyawan harus berpegang pada etika bisnis dan pedoman perilaku (*code of conduct*) yang telah disepakati.

(3) Responsibilitas (*Responsibility*)



kepentingan untuk memberikan masukan dan menyampaikan pendapat bagi kepentingan perusahaan) serta membuka akses terhadap informasi sesuai dengan prinsip transparansi dalam lingkup 27 kedudukan masing-masing. Juga, perusahaan harus memberikan perlakuan yang setara dan wajar kepada pemangku kepentingan sesuai dengan manfaat dan kontribusi yang diberikan kepada perusahaan.

c. Tujuan *Good Corporate Governance*

Penerapan Corporate Governance memiliki beragam tujuan. Beberapa tujuan yang dapat dicapai melalui penerapan *Good Corporate Governance* diantaranya adalah sebagai berikut:

Implementasi mekanisme Corporate Governance diharapkan dapat mengurangi masalah masalah yang timbul sebagai akibat dari adanya masalah keagenan. Pada gilirannya hal tersebut akan menimbulkan perasaan aman pada seluruh pemegang saham ataupun investor lainnya bahwa hak-hak mereka diperhatikan dan dilindungi. Manajemen ataupun pemegang saham mayoritas sebagai pengendali perusahaan diharuskan untuk bertindak dalam koridor aturan yang ada dan tidak dapat lagi bertindak semaunya mengeksploitasi ketidakmampuan ataupun keterbatasan informasi yang dimiliki investor. Iklim saling percaya di antara pemilik dana dan pengelola perusahaan yang diatur dalam mekanisme tata kelola perusahaan yang baik diharapkan akan mendorong kinerja perusahaan lebih meningkat lagi. Hal ini tentunya akan menguntungkan kedua belah pihak, pemilik dana dan pengelola perusahaan.

Selain itu, kesadaran mengenai praktik *Good Corporate Governance* akan mendorong transparansi perusahaan. Investor akan mengapresiasi nilai informasi lengkap yang disajikan perusahaan untuk membantu mereka mengevaluasi kinerja sekaligus prospek perusahaan di masa datang. Meskipun tidak banyak perhatian terhadap peranan pemegang saham di masa lalu, meningkatnya kesadaran mengenai tata kelola perusahaan akan meningkatkan apresiasi





terhadap pentingnya nilai pemegang saham perusahaan dalam mencapai tujuan jangka panjang perusahaan.

Penerapan *Good Corporate Governance* juga dapat mencegah terjadinya praktik-praktik yang tidak sehat seperti perdagangan orang dalam (insider trading), akuisisi internal dan transaksi hubungan istimewa yang merugikan pemegang saham minoritas. Selain itu, penerapan tata kelola perusahaan yang baik mendorong terciptanya iklim persaingan yang sehat dalam suasana keterbukaan informasi. Dengan demikian, apabila semua perusahaan menerapkan mekanisme *Good Corporate Governance* diharapkan bahwa kinerja perusahaan di Indonesia akan meningkat. Pada akhirnya hal ini tentunya akan mempengaruhi persepsi investor mengenai investasi di Indonesia, dan juga pada jumlah premium yang bersedia dibayar oleh investor untuk perusahaan yang melaksanakan *Good Corporate Governance*.

Penerapan sistem *Good Corporate Governance* diharapkan dapat meningkatkan nilai tambah bagi semua pihak yang berkepentingan (stakeholders) melalui beberapa tujuan berikut:

- (1) Meningkatkan efisiensi, efektifitas, dan kesinambungan suatu organisasi yang memberikan kontribusi kepada terciptanya kesejahteraan pemegang saham, pegawai dan stakeholders lainnya dan merupakan solusi yang elegan dalam menghadapi tantangan organisasi kedepan.
- (2) Meningkatkan legitimasi organisasi yang dikelola dengan terbuka, adil, dan dapat dipertanggungjawabkan.
- (3) Mengakui dan melindungi hak dan kewajiban para shareholders dan stakeholders .

Menurut Siswanto Sutojo dan E. John Aldridge (2005:5-6), *Good Corporate Governance* mempunyai lima macam tujuan utama. Kelima tujuan tersebut adalah sebagai berikut.

- (1) Melindungi hak dan kepentingan pemegang saham.



- (2) Melindungi hak dan kepentingan para anggota the stakeholders nonpemegang saham.
- (3) Meningkatkan nilai perusahaan dan para pemegang saham.
- (4) Meningkatkan efisiensi dan efektifitas kerja Dewan Pengurus atau Board of Directors dan manajemen perusahaan
- (5) Meningkatkan mutu hubungan Board of Directors dengan manajemen senior perusahaan.

d. Manfaat *Good Corporate Governance*

Menurut Wilson Arafat (2008:10) *Good Corporate Governance* akan memberikan empat manfaat besar yaitu sebagai berikut:

- (1) Meningkatkan kinerja perusahaan melalui terciptanya proses pengambilan keputusan yang lebih baik, meningkatkan efisiensi operasional perusahaan serta lebih meningkatkan pelayanan kepada stakeholders .
- (2) Meningkatkan corporate value.
- (3) Meningkatkan kepercayaan investor.
- (4) Pemegang saham akan merasa puas dengan kinerja perusahaan karena sekaligus akan meningkatkan shareholder's value dan dividen.

Sedangkan menurut Tjager dkk (2003) mengatakan bahwa paling tidak ada lima alasan mengapa mengapa penerapan GCG itu bermanfaat, yaitu:

- (1) Berdasarkan survey yang telah dilakukan oleh McKinsey dan Company menunjukkan bahwa para investor institusional lebih menaruh kepercayaan terhadap perusahaan-perusahaan di Asia yang telah menerapkan GCG.
- (2) Berdasarkan berbagai analisis ternyata ada indikasi keterkaitan antara terjadinya krisis financial dan krisis berkepanjangan di Asia dengan lemahnya tata kelola perusahaan.
- (3) Internasionalisasi pasar – termasuk liberalisasi pasar financial dan pasar modal menuntut perusahaan untuk menerapkan GCG.



(4) Kalau GCG bukan obat mujarab untuk keluar dari krisis system ini dapat menjadi dasar bagi berkembangnya system nilai baru yang lebih sesuai dengan lanskap bisnis yang kini telah banyak berubah.

(5) Secara teoritis, praktik GCG dapat meningkatkan nilai perusahaan.

Menurut Mas Ahmad Daniri (2005;14) jika perusahaan menerapkan mekanisme penerapan Good Corporate Governance (GCG) secara konsisten dan efektif maka akan dapat memberikan manfaat antara lain:

- (1) Mengurangi agency cost, yaitu suatu biaya yang harus ditanggung oleh pemegang saham akibat pendelegasian wewenang kepada pihak manajemen.
- (2) Mengurangi biaya modal (Cost of Capital).
- (3) Meningkatkan nilai saham perusahaan di mata publik dalam jangka panjang.
- (4) Menciptakan dukungan para stakeholder dalam lingkungan perusahaan terhadap keberadaan perusahaan dan berbagai strategi dan kebijakan yang ditempuh perusahaan

e. Mekanisme *Good Corporate Governance*

Mekanisme *Good Corporate Governance* pada penelitian ini terdiri dari kepemilikan manajerial, kepemilikan institusional, komisaris independen, komite audit, dewan direksi.

(1) Kepemilikan Manajerial

Susiana dan Herawaty (2007), menyatakan kepemilikan manajerial merupakan saham yang dimiliki oleh manajemen secara pribadi maupun saham yang dimiliki oleh anak cabang perusahaan bersangkutan beserta afiliasinya. Dengan kata lain kepemilikan manajerial yaitu adalah kepemilikan pemegang saham dari manajemen yang terdiri dari direktur dan komisaris yang diukur dengan menggunakan persen-tase jumlah saham manajemen terhadap jumlah

seluruh saham yang beredar. Variabel Kepemilikan Manajerial (KM) dalam penelitian ini diukur dengan menggunakan rumus sebagai berikut:

$$KM = \frac{\text{Jumlah saham yang dimiliki manajer}}{\text{Total saham beredar}} \times 100\%$$

(2) Kepemilikan Institusional

Kepemilikan institusional yaitu merupakan saham yang dimiliki oleh investor yang berasal dari pihak institusi perusahaan. Kepemilikan institusional dapat diukur menggunakan skala rasio melalui jumlah saham yang dimiliki oleh investor institusional dibandingkan dengan total saham perusahaan. Dengan tingkat kepemilikan yang tinggi maka akan menimbulkan usaha pengawasan yang sangat besar oleh pihak investor institusional sehingga dapat menghalangi perilaku sehingga dapat menghalangi perilaku oportunistik yang dilakukan manajer. Variabel Kepemilikan Institusional (KI) dalam penelitian ini diukur dengan menggunakan rumus sebagai berikut:

$$KI = \frac{\text{Jumlah saham Investor Institusi}}{\text{Total saham beredar}} \times 100\%$$

(3) Komisaris Independen

Istilah independen dapat diartikan sebagai merdeka, bebas, tidak memihak, tidak dalam tekanan pihak tertentu, netral, objektif, punya integritas, dan tidak dalam posisi konflik kepentingan. Dewan komisaris independen yaitu anggota dewan yang tidak memiliki hubungan keuangan, kepengurusan, kepemilikan saham dan hubungan keluarga dengan anggota dewan lainnya direksi atau pemegang saham pengendali atau hubungan lain yang dapat mempengaruhi kemampuannya untuk bertindak independen. Keberadaan dewan komisaris independen dimaksudkan untuk mendorong untuk terciptanya iklim dan



lingkungan kerja yang lebih objektif dan mendapatkan kewajaran serta kesetaraan diantara berbagai kepentingan termasuk kepentingan pemegang minoritas. Komisaris independen berperan sebagai penyeimbang dalam pengambilan keputusan dewan komisaris. Variabel Komisaris Independen (KOMIN) dalam penelitian ini diukur dengan menggunakan rumus sebagai berikut:

$$KOMIN = \frac{\text{Jumlah dewan komisaris independen}}{\text{Jumlah dewan komisaris}}$$

(4) Komite Audit

Komite Audit adalah suatu komite yang berpandangan tentang masalah akuntansi, laporan keuangan dan penjelasannya, sistem pengawasan internal serta auditor independen (Riniati, 2015). Anggota komite audit terdiri dari 3 dengan 5 bahkan terkadang sampai 7 orang yang bukan merupakan bagian manajemen perusahaan. Berdasarkan pengertian tersebut, maka dapat diketahui bahwa komite audit merupakan suatu kelompok yang sifatnya independen dan diangkat secara khusus serta memiliki pandangan yang terkait dengan sistem pengawasan internal perusahaan serta bertugas membantu dan memperkuat fungsi dewan komisaris atau dewan pengawas dalam menjalankan fungsi pengawasan atas proses pelaporan keuangan, manajemen risiko, pelaksanaan audit dan implementasi dari *corporate governance* di perusahaan. Variabel Komite Audit (KA) dalam penelitian ini diukur dengan menggunakan rumus sebagai berikut:

$$KA = \text{Jumlah Anggota Komite Audit}$$

(5) Dewan Direksi

dewan direksi sebagai organ perusahaan yang bertugas dan bertanggung jawab secara kolektif dalam mengelola perusahaan sehingga pelaksanaan tugas oleh masing-masing



anggota direksi tetap merupakan tanggung jawab bersama. Menurut Wallace dan Zinkin (2015:22), menyatakan dewan direksi merupakan seseorang yang semestinya memutuskan atau biasanya memberikan keputusan bersama-sama dengan anggota dewan direksi lainnya dalam menentukan tindakan-tindakan yang diperlukan. Dewan direksi juga berperan dalam meningkatkan hubungan dengan pihak luar perbankan. Hubungan perbankan dengan pihak luar sangat penting bagi perbankan dalam proses menghimpun dan menyalurkan dana. Dewan direksi diukur dengan jumlah anggota yang ada perusahaan. Variabel Dewan Direksi (DD) dalam penelitian ini diukur dengan menggunakan rumus sebagai berikut:

$$DD = \text{Jumlah Anggota Dewan Direksi}$$

3. Teori Keagenan (Agency Theory)

Dari sudut pandang teori akuntansi, timbulnya *earning management* atau manajemen laba dapat juga dijelaskan dengan teori keagenan (Jensen dan Meckling, 1976). Teori keagenan memprediksi dan menjelaskan perilaku pihak-pihak yang terkait dengan perusahaan. Dalam ilmu hukum, agen adalah seseorang yang dipekerjakan untuk mewakili kepentingan orang lain. Teori keagenan menganggap bahwa perusahaan sebagai suatu nexus (*intersection*) dari hubungan keagenan dan berusaha memahami perilaku keorganisasian dengan melihat bagaimana pihak-pihak terkait dalam hubungan keagenan dalam perusahaan memaksimalkan utilitas mereka sendiri.

Salah satu hubungan keagenan utama adalah antara kelompok manajemen dan kelompok pemilik perusahaan. Manajer dipekerjakan oleh pemilik perusahaan untuk mengelola kegiatan perusahaan, sehingga menciptakan hubungan keagenan. Tujuan pemilik dan manajer mungkin saja berbeda, sehingga dengan mudahnya terlihat perilaku memaksimalkan utilitas manajer dapat berlawanan dengan kepentingan pemilik. *Owners* berkepentingan untuk memaksimalkan *return investment* dan harga sekuritas, sedangkan





manajer memiliki kebutuhan ekonomi dan psikologis yang lebih luas, termasuk memaksimalkan total kompensasi mereka, yang terpenuhi lewat kontrak kerja. Karena konflik potensial ini, *owners* dimotivasi untuk mengadakan kontrak dengan manajer dengan cara yang dapat meminimalkan konflik tujuan antara kedua kelompok. Biaya-biaya ini dibebankan dalam mengawasi kontrak agensi dengan manajemen, dan biaya-biaya ini mengurangi kompensasi manajer, sehingga manajer memiliki insentif untuk menjaga agar biaya ini tetap rendah dengan tidak berkonflik dengan *owners*.

Teori keagenan menyajikan konflik antara *owners* dan *managers* yang dimitigasi sebagian oleh pelaporan keuangan, yang merupakan salah satu cara owner dapat mengawasi kontrak kerja dengan manajer mereka. Akuntan mereferensikan tipe tradisional pelaporan ini sebagai *stewardship*, atau akuntabilitas kepada pemilik perusahaan. Meminimalkan biaya *monitoring agency* menjadi insentif bagi manajer untuk melaporkan hasil secara *reliable* kepada pemilik, karena manajer diberi penghargaan dan dinilai sedikitnya dengan seberapa baiknya laporan mereka. Laporan yang baik juga meningkatkan reputasi manajer, yang dapat meningkatkan kompensasi mereka.

Scott (2009) menyatakan bahwa perusahaan mempunyai banyak kontrak, misalnya kontrak kerja antara perusahaan dengan para manajernya dan kontrak pinjaman antara perusahaan dengan krediturnya. Tetapi di satu sisi, agent memiliki informasi yang lebih banyak (*full information*) dibanding dengan *principal* di sisi lain, sehingga menimbulkan adanya *asimetry information*. Informasi yang lebih banyak dimiliki oleh manajer dapat memicu untuk melakukan tindakan-tindakan sesuai dengan keinginan dan kepentingan untuk memaksimalkan *utility*nya. Sedangkan bagi pemilik modal dalam hal ini investor, akan sulit untuk mengontrol secara efektif tindakan yang dilakukan oleh manajemen karena hanya memiliki sedikit informasi yang ada. Oleh karena itu, terkadang kebijakan-kebijakan tertentu

Hak Cipta dimiliki IBI PKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie) dan Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie. 1. Dilarang menyalin atau seluruhnya atau sebagian karya tulis ini tanpa ijin pencetakan dan penyusunan surver. 2. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah. 3. Dilarang mengutip atau sebagian atau seluruhnya karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBI PKG.

yang dilakukan oleh manajemen perusahaan tanpa sepengetahuan pihak pemilik modal atau investor.

Konsep *agency theory* menggambarkan hubungan kontrak antara *agent* dan *principal*, dimana *agent* berkewajiban untuk melakukan tugas bagi kepentingan *principal*.

Dalam hubungan keagenan, masing-masing pihak terdorong motivasi yang berbeda sesuai dengan kepentingannya. Dan apabila setiap pihak berusaha mencapai dan atau mempertahankan tingkat kemakmuran yang dikehendaki, maka dalam hubungan ini dapat saja terjadi konflik kepentingan antara manajemen selaku agen dan pemilik perusahaan selaku *principal*. Dalam hal ini agent termotivasi untuk memaksimalkan fee kontraktual yang diterimanya dan *principal* berusaha untuk memaksimalkan *return* atas penggunaan sumber daya.

Jensen dan Meckling (1976) menyatakan bahwa jika agent dan *principal* tersebut adalah orang-orang yang berupaya memaksimalkan utilitasnya, maka alasan yang kuat untuk meyakini bahwa agen tidak akan selalu bertindak yang terbaik untuk kepentingan prinsipal.

Selanjutnya, Jensen dan Meckling (1976) menjelaskan beberapa bentuk biaya keagenan, yang terdiri dari:

(1) Biaya pemantauan (*the monitoring expenditure by the principal*).

Biaya pengawasan yang harus dikeluarkan oleh pemilik. Biaya ini dikeluarkan untuk memantau manajer dengan cara mengukur, mengamati, dan mengendalikan perilaku manajer.

(2) Biaya penjaminan (*the bonding cost*).

Biaya yang harus dikeluarkan akibat pemantauan yang harus dikeluarkan prinsipal kepada agen. Biaya ini muncul untuk menjamin manajer agar mengambil keputusan yang tidak merugikan dan sesuai dengan kepentingan pemegang saham.

(3) Kerugian residu (*the residual loss*).



Biaya ini adalah kerugian yang ditanggung meskipun pemantauan (*monitoring*) dan penjaminan (*bonding*) telah dilaksanakan.

Masalah keagenan sebenarnya muncul ketika prinsipal kesulitan untuk memastikan bahwa agen bertindak untuk memaksimalkan kesejahteraan prinsipal. Menurut teori keagenan, salah satu mekanisme yang secara luas digunakan dan diharapkan dapat menyalurkan tujuan prinsipal dan agen ini adalah melalui mekanisme pelaporan keuangan. *Signalling theory* mengemukakan bahwa *agent* selaku perwakilan *principal*, seharusnya menyampaikan signal-signal keberhasilan atau kegagalan yang telah dicapai kepada *principal*. Penyampaian laporan keuangan oleh pihak manajemen telah berbuat sesuai dengan kontrak yang sudah disepakati. Namun manajemen yang memiliki informasi lebih dibandingkan dengan pihak lain.

Eisenhardt (1989) menyatakan bahwa teori keagenan menggunakan tiga asumsi sifat manusia yaitu:

- (1) manusia pada umumnya mementingkan diri sendiri (*self interest*),
- (2) manusia memiliki daya pikir terbatas mengenai persepsi masa mendatang (*bounded rationality*),
- (3) manusia selalu menghindari resiko (*risk averse*).

Sesuai dengan asumsi sifat dasar manusia tersebut manajer sebagai manusia akan bertindak *opportunistic*, yaitu mengutamakan kepentingan pribadinya (Haris, 2004). Tindakan oportunistis tersebut dilakukan dengan memanipulasi laporan keuangan, yang salah satunya adalah melakukan perbaikan profil laba.

B. Penelitian Terdahulu

Berikut adalah penelitian-penelitian terdahulu yang menginspirasi peneliti untuk melakukan penelitian ini:

Tabel 2.1



Penelitian Terdahulu

Nama Peneliti	Yusuf Agung Gumelar Sitorus
Judul Penelitian	PENGARUH GOOD CORPORATE GOVERNANCE TERHADAP KINERJA KEUANGAN PERUSAHAAN (Studi Empiris Perusahaan Makanan Dan Minuman Di Bursa Efek Indonesia Tahun 2014-2016)
Tahun Penelitian	2018
Variabel Penelitian	Dewan Direksi, Dewan Komisaris, Komite Audit, dan Return On Asset (ROA)
Kesimpulan	Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa dewan direksi berpengaruh signifikan terhadap kinerja keuangan, dewan komisaris berpengaruh signifikan terhadap kinerja keuangan, dan komite audit berpengaruh signifikan terhadap kinerja keuangan.
Nama Peneliti	Wiendy Indriati
Judul Penelitian	PENGARUH GOOD CORPORATE GOVERNANCE TERHADAP KINERJA KEUANGAN PERUSAHAAN (Studi Empiris pada Perusahaan Manufaktur Sektor Food and Beverage yang Listing di BEI pada Tahun 2014-2017)
Tahun Penelitian	2018
Variabel Penelitian	Dewan Komisaris Independen, Komite Audit, dan Kepemilikan

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
 Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 a. Penutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
 2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.





	Manajerial berpengaruh
Kesimpulan	Hasil penelitian menunjukkan bahwa dewan komisaris independen dan komite audit berpengaruh positif terhadap kinerja keuangan, sedangkan kepemilikan manajerial berpengaruh negatif terhadap kinerja keuangan.
Nama Peneliti	Amin Handoko Putra
Judul Penelitian	PENGARUH <i>GOOD CORPORATE GOVERNANCE</i> TERHADAP KINERJA KEUANGAN PERUSAHAAN (Studi Empiris Perusahaan Makanan dan Minuman di Bursa Efek Indonesia tahun 2015-2018)
Tahun Penelitian	2020
Variabel Penelitian	Dewan Direksi, Komite Audit dan Dewan Komisaris
Kesimpulan	Hasil penelitian menunjukkan dewan direksi berpengaruh terhadap kinerja keuangan, sedangkan komite audit tidak pengaruh terhadap kinerja keuangan dan dewan komisaris berpengaruh terhadap kinerja keuangan.

C. Kerangka Pemikiran

1. Pengaruh Kepemilikan Manajerial terhadap Kinerja Keuangan

Berdasarkan teori agensi dinyatakan bahwa kepemilikan manajerial merupakan salah satu mekanisme yang efektif untuk mengatasi konflik keagenan. Efektifnya kepemilikan manajerial sebagai mekanisme untuk mengatasi konflik keagenan berkaitan dengan adanya

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
 Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



kepentingan manajemen untuk mengelola perusahaan secara efisien guna meningkatkan nilai perusahaan. Semakin tinggi kepemilikan manajerial maka akan semakin efisien perusahaan

dapat mengelola sehingga meningkatkan kinerja keuangan perusahaan. Melia & Yulius (2015) dan Gita & Muhammad (2019) menyatakan bahwa kepemilikan manajerial berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja keuangan perusahaan. Semakin tinggi tingkat kepemilikan manajerial, maka semakin tinggi tingkat kinerja keuangan perusahaan.

Berdasarkan paparan tersebut serta didukung oleh penelitian terdahulu, maka hipotesis pertama di dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

H₁ : Kepemilikan Manajerial berpengaruh positif terhadap Kinerja Keuangan Perusahaan.

2. Pengaruh Kepemilikan Institusional terhadap Kinerja Keuangan

Kepemilikan institusional menurut Ujiyantho dan Pramuka (2007) dalam Adi (2011) merupakan proporsi kepemilikan saham oleh institusi seperti perusahaan asuransi, bank dan perusahaan-perusahaan investasi. Kepemilikan institusional diukur dengan menggunakan rasio antara jumlah lembar saham yang dimiliki oleh institusi terhadap jumlah lembar saham perusahaan yang beredar secara keseluruhan. Menurut Kartikawati (2007) kepemilikan oleh institusi akan mendorong peningkatan pengawasan yang lebih optimal terhadap kinerja manajemen, karena kepemilikan saham mewakili suatu sumber kekuasaan yang dapat digunakan untuk mendukung atau sebaliknya terhadap keberadaan manajemen. Hasil penelitian Kartikawati (2007) menunjukkan bahwa kepemilikan institusional berpengaruh positif terhadap kinerja keuangan perusahaan.

Menurut Widjaja dan Kasenda (2008) dalam Saffudin (2011) tingkat kepemilikan yang tinggi oleh institusi dalam suatu perusahaan akan menimbulkan usaha pengawasan yang lebih besar yang dilakukan oleh investor institusional sehingga akan dapat mengontrol manajer untuk tidak melakukan perbuatan yang tidak sejalan dengan kepentingan pemegang



saham yang pada akhirnya akan mengurangi *agency cost*. Bathala, *et al* (1994) juga menemukan bahwa kepemilikan institusional menggantikan kepemilikan manajerial dalam mengontrol *agency cost*. Semakin besar kepemilikan oleh institusi keuangan maka akan semakin besar kekuatan suara dan dorongan institusi keuangan untuk mengawasi manajemen dan akibatnya akan memberikan dorongan yang lebih besar untuk mengoptimalkan nilai perusahaan sehingga kinerja perusahaan juga akan meningkat.

Berdasarkan pemaparan di atas rumusan hipotesis yang dapat diajukan dalam penelitian ini adalah:

H₂: Kepemilikan Institusional berpengaruh positif terhadap kinerja keuangan perusahaan

3. Pengaruh Komisaris Independen terhadap Kinerja Keuangan

Menurut Farida, Prasetyo, dan Herwiyanti (2010) Dewan Komisaris Independen adalah anggota dewan komisaris yang berasal dari luar perusahaan. Komposisi Dewan Komisaris Independen diukur berdasarkan presentase jumlah Dewan Komisaris Independen terhadap jumlah total komisaris yang ada dalam susunan Dewan Komisaris perusahaan. Komisaris independen adalah anggota Dewan Komisaris yang tidak memiliki hubungan keuangan, kepengurusan, kepemilikan saham dan/atau hubungan keluarga dengan anggota Dewan Komisaris lainnya, direksi dan/atau pemegang saham pengendali atau hubungan lain yang dapat mempengaruhi kemampuannya untuk bertindak independen. Menurut FCGI (2003) Komisaris independen memikul tanggung jawab untuk mendorong secara proaktif agar komisaris dalam melaksanakan tugasnya sebagai pengawas dan penasihat direksi dapat memastikan perusahaan memiliki strategi bisnis yang efektif (termasuk di dalamnya memantapkan jadwal, anggaran dan efektifitas strategi tersebut), memastikan perusahaan memiliki eksekutif dan manajer yang profesional, memastikan perusahaan memiliki informasi, sistem pengendalian, dan sistem audit yang bekerja dengan baik, memastikan

perusahaan mematuhi hukum dan perundangan yang berlaku maupun nilai-nilai yang ditetapkan perusahaan dalam menjalankan operasinya, memastikan resiko dan potensi krisis selalu diidentifikasi dan dikelola dengan baik serta memastikan prinsip-prinsip dan praktek *Good Corporate Governance* dipatuhi dan diterapkan dengan baik.

Penelitian mengenai dampak dari proporsi dewan komisaris independen terhadap kinerja perusahaan ternyata masih beragam. Ayuso dan Argondana (2007) dalam Santoso (2012) menyatakan bahwa Komisaris Independen lebih efektif dalam melakukan pengawasan terhadap perusahaan karena kepentingan mereka tidak terganggu oleh ketergantungan pada organisasi. Menurut Fama dan Jansen (1983) dalam Santoso (2012) Komisaris yang berasal dari luar perusahaan dapat meningkatkan keefektifan Dewan Komisaris dalam melakukan fungsi utamanya, yaitu mengawasi pengelolaan perusahaan oleh manajemen. Pathan, Skully, dan Wickramanayake (2007) dalam Santoso (2012) menyimpulkan terdapat pengaruh signifikan positif antara proporsi Komisaris Independen dengan kinerja perbankan. Ada penelitian yang menyatakan bahwa tingginya proporsi dewan luar berhubungan positif dengan kinerja perusahaan. dalam penelitian yang dilakukan oleh Yermack (1996); Daily dan Dalton (1993); Streamns dan Mizruchi (1993) menyatakan bahwa tingginya proporsi dewan luar berpengaruh positif terhadap kinerja perusahaan. Berdasarkan pemaparan diatas rumusan hipotesis yang dapat diajukan dalam penelitian ini adalah :

H₃ : Komisaris Independen berpengaruh positif terhadap kinerja keuangan perusahaan

4. Pengaruh Komite Audit terhadap Kinerja Keuangan

Komite audit adalah sekumpulan orang yang dipilih dari anggota dewan komisaris yang bertanggung jawab untuk mengawasi proses pelaporan keuangan dan pengungkapan (*disclosure*). Keberadaannya diharapkan dapat menciptakan nilai tambah bagi perusahaan. Dalam kerangka dasar *corporate governance*, implementasi prinsip-prinsip *corporate*





governance tergantung atas tiga pilar penting, yaitu *internal control* yang kuat, audit internal yang independen dan audit eksternal yang memberikan *feedback* terhadap efektifitas dari proses internal control yang ada di dalam perusahaan. Untuk menunjang keefektifan ketiga pilar tersebut, peran Komite Audit sebagai perpanjangan tangan Dewan Komisaris juga harus efektif dan dioptimalkan. Menurut Bradbury, *et al* (2004) komite audit bertugas membantu Dewan Komisaris untuk memonitor proses pelaporan keuangan oleh manajemen untuk meningkatkan kredibilitas laporan keuangan. Tugas komite audit meliputi menelaah kebijakan akuntansi yang diterapkan oleh perusahaan, menilai pengendalian internal, menelaah sistem pelaporan eksternal dan kepatuhan terhadap peraturan. Menurut Bradbury, *et al* (2004) di dalam pelaksanaan tugasnya komite menyediakan komunikasi formal antara dewan, manajemen, auditor eksternal, dan auditor internal.

McMullen (1996) dalam Siallagan dan Machfoedz (2006) menyatakan bahwa investor, analis dan regulator menganggap komite audit memberikan kontribusi dalam kualitas pelaporan keuangan. Hal ini membuktikan keberadaan komite audit secara positif dan signifikan mempengaruhi kinerja perusahaan. Menurut Sam'ani (2008) komite audit meningkatkan integritas dan kredibilitas pelaporan keuangan melalui:

- (1) pengawasan atas proses pelaporan termasuk sistem pengendalian internal dan penggunaan prinsip akuntansi berterima umum
- (2) mengawasi proses audit secara keseluruhan.

Hasilnya mengindikasikan bahwa adanya komite audit memiliki konsekuensi pada laporan keuangan yaitu:

- (1) berkurangnya pengukuran akuntansi yang tidak tepat
- (2) berkurangnya pengungkapan akuntansi yang tidak tepat
- (3) berkurangnya tindakan kecurangan manajemen dan tindakan illegal.



Berdasarkan pemaparan di atas rumusan hipotesis yang dapat diajukan dalam penelitian ini adalah :

H₁: Komite Audit berpengaruh positif terhadap kinerja keuangan perusahaan.

5. Pengaruh Dewan Direksi terhadap Kinerja Keuangan

Komite Nasional Kebijakan *Governance* (KNKG) 2006 menyatakan bahwa Direksi sebagai organ perusahaan bertugas dan bertanggungjawab secara kolegal dalam mengelola perusahaan. Masing-masing anggota Direksi dapat melaksanakan tugas dan mengambil keputusan sesuai dengan pembagian tugas dan wewenangnya. Mizruchi (1983) dalam Madiastuti dan Mackfudz (2003) menjelaskan bahwa Dewan Direksi merupakan pusat pengambilan di dalam perusahaan, dan dewan ini merupakan penanggung jawab utama dalam tingkat kesehatan dan keberhasilan perusahaan secara jangka panjang. Dewan Direksi merupakan faktor penentu terbentuknya kebijakan yang akan diambil perusahaan, selain itu Dewan Direksi juga yang menentukan strategi apa yang akan diambil perusahaan dalam jangka pendek maupun panjang.

Board size atau ukuran dewan direksi adalah jumlah dewan direksi dalam perusahaan, semakin banyak dewan dalam perusahaan akan memberikan suatu bentuk pengawasan terhadap kinerja perusahaan yang semakin lebih baik, dengan kinerja perusahaan yang baik dan terkontrol, maka akan menghasilkan profitabilitas yang baik dan nantinya akan meningkatkan harga saham perusahaan dan kinerja keuangan perusahaan pun juga akan ikut meningkat. Hal ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Isshaq, *et al* (2009), hasil penelitiannya menunjukkan bahwa ada hubungan yang signifikan positif antara *board size* dengan kinerja perusahaan.

Ukuran dan komposisi dewan direksi dapat mempengaruhi efektif tidaknya aktivitas monitoring. Menurut Pfefer (1973) dan Pearce dan Zahra (1992) dalam Faisal (2005) bahwa peningkatan ukuran dan diversitas dari dewan direksi akan memberikan manfaat bagi

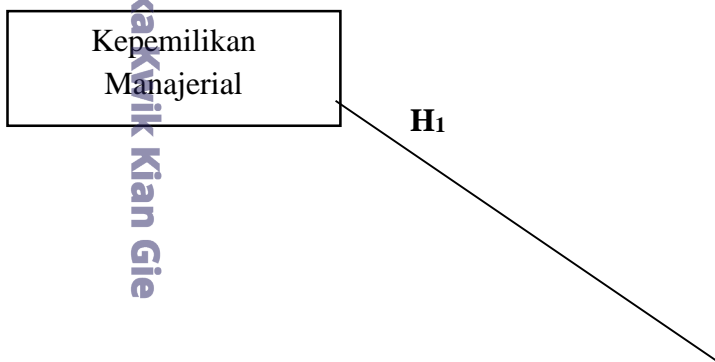
perusahaan karena terciptanya *network* dengan pihak luar perusahaan dan menjamin ketersediaan sumberdaya. Hal ini didukung oleh pendapat Alexander, Fernell, Halporn (1993) dan Goodstein, Gautam, Boeker (1994) dalam Wardhani (2006) yang menyatakan jumlah dewan yang besar menguntungkan perusahaan dari sudut pandang *resource dependence* yaitu bahwa perusahaan tergantung dengan dewannya untuk dapat mengelola sumber dayanya secara lebih baik.

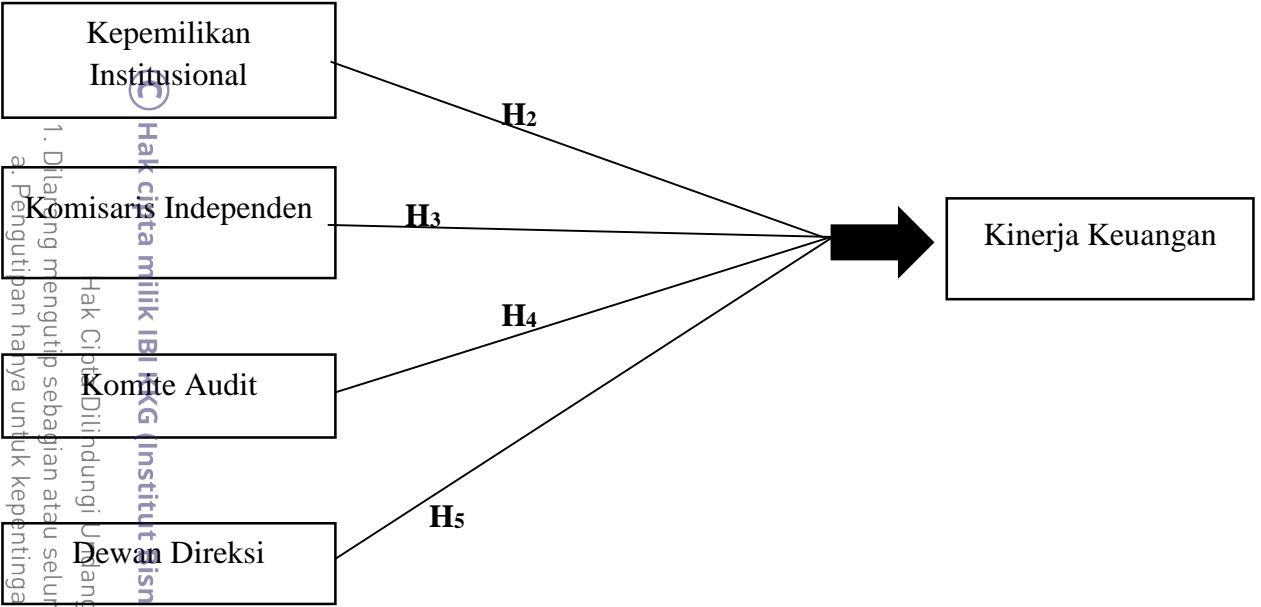
Berdasarkan pemaparan di atas, maka rumusan hipotesis yang dapat diajukan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

H₁ : Dewan Direksi berpengaruh positif terhadap kinerja keuangan perusahaan.

Gambar 2.1

Kerangka Pemikiran





D. Hipotesis

- H₁: Kepemilikan Manajerial berpengaruh positif terhadap kinerja keuangan perusahaan.
- H₂: Kepemilikan Institusional berpengaruh positif terhadap kinerja keuangan perusahaan.
- H₃: Komisaris Independen berpengaruh positif terhadap kinerja keuangan perusahaan.
- H₄: Komite Audit berpengaruh positif terhadap kinerja keuangan perusahaan.
- H₅: Dewan Direksi berpengaruh positif terhadap kinerja keuangan perusahaan.